

Bahasa Sopan di Media Sosial sebagai Wujud Kewargaan Digital: Kajian Humaniora pada Generasi Z

Polite Language on Social Media as Digital Citizenship: A Humanities Study of Generation Z

Mulawarman¹, Dhani Dwi Saputra², Andries Riesfandhy³, Nurul Soleha⁴

^{1,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi Sudirman, Bone, Indonesia

² Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 03

Page :302-310

Published : 2026

KEYWORDS

Polite Language, Social Media,
Digital Citizenship, Generation Z,
Pancasila

CORRESPONDENCE

Phone: +6281248588074

E-mail:

dhanidwisaputra22@gmail.com

A B S T R A C T

Purpose: This study analyzes three dimensions of digital communication among Indonesian Generation Z, namely lexical choices, emoji functions, and online communication styles, as indicators of Pancasila-based digital citizenship ethics, in response to the paradox that high social media usage is not accompanied by language quality reflecting Pancasila values. **Design/methodology/approach:** The study uses a critical-qualitative library research method triangulated with Fairclough's Critical Discourse Analysis, Kress's Social Multimodal Semiotics, and Pancasila normative analysis. **Findings:** The analysis reveals a significant digital citizenship dissonance. Aggressive lexical choices form and intensify through algorithmic-based linguistic normalization; emoji operate as a layered semiotic system enabling covert aggression; and communication styles such as echo chambers and cancel culture structurally undermine democratic deliberation. **Research limitations/implications:** The proposed framework needs to be tested empirically through field research, large-scale digital linguistic corpus analysis, and studies of its implementation effectiveness in civic education. **Practical implications:** Transforming civic education from a value-transmission model to an experiential-contextual approach is an urgency that cannot be deferred. **Originality/value:** This study introduces the Triadic Framework of Pancasila-Based Digital Language Citizenship (TKLDB-P), which integrates linguistic, semiotic, and pragmatic dimensions with the normative reference of Pancasila's five principles.

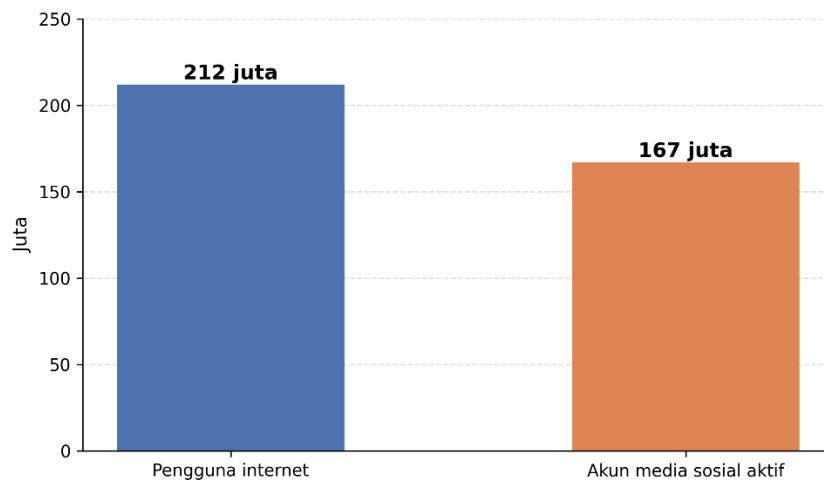
INTRODUCTION

Revolusi komunikasi yang dipicu oleh platform media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi, membentuk opini, dan membangun identitas sosial secara fundamental. Instagram, TikTok, X, YouTube, dan WhatsApp kini berfungsi bukan sekadar sebagai sarana hiburan, melainkan

sebagai ruang publik digital tempat berbagai wacana sosial, politik, budaya, dan pendidikan dipertukarkan secara masif.

Skala fenomena ini tercermin dalam data global: pengguna media sosial aktif dunia mencapai lebih dari 5 miliar orang atau setara 62,3 persen populasi dunia (Kemp, 2024). Indonesia termasuk lima negara pengguna terbesar, mencatat 167 juta akun aktif dari total 212 juta pengguna internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Kelompok terbesar di antara mereka adalah Generasi Z, yakni individu yang lahir antara 1997 dan 2012, yang tumbuh bersamaan dengan teknologi digital sehingga disebut digital natives (Prensky, 2001).

Gambar 1. Pengguna Internet dan Akun Media Sosial Aktif di Indonesia (2023)



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023)

Bagi Generasi Z, media sosial jauh melampaui fungsi komunikasi biasa. Platform digital telah berkembang menjadi arena pembentukan identitas, ruang ekspresi diri, dan panggung partisipasi terhadap isu-isu publik. Pengaruhnya dalam membentuk nilai dan perilaku bahkan melampaui peran institusi sosialisasi tradisional seperti keluarga dan sekolah.

Di balik luasnya jangkauan tersebut, terdapat kenyataan yang mengkhawatirkan. Ujaran kebencian (hate speech), serangan berbasis identitas, dan perundungan siber (cyberbullying) semakin marak di platform yang didominasi Generasi Z (Kowalski dkk., 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2023) mencatat peningkatan signifikan laporan konten negatif, dengan kelompok usia 15-24 tahun sebagai pelaku sekaligus korban terbanyak. Masalah ini tidak berhenti pada kata-kata kasar yang eksplisit: diksi yang melukai, emoji bermuatan ironi merendahkan, dan singkatan digital sebagai selubung agresi adalah bentuk-bentuk bahasa bermasalah yang kerap tidak dikenali sebagai pelanggaran etika (Dresner & Herring, 2010).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk warga negara yang beradab, santun, dan bertanggung jawab (Winarno, 2020). Namun data menunjukkan bahwa penguasaan kognitif atas nilai-nilai Pancasila belum otomatis menghasilkan perilaku komunikasi yang etis di ruang digital (Budimansyah, 2021). Kesenjangan antara pemahaman normatif (knowing) dan tindakan aktual (doing) inilah yang menjadi problem pedagogis mendasar kajian ini. Ribble (2015) mendefinisikan kewargaan digital sebagai seperangkat norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, yang mencakup dimensi etika, keamanan, literasi, serta hak dan

kewajiban di ranah digital. Dalam konteks Indonesia, kewargaan digital tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan berbangsa.

Kajian-kajian sebelumnya memberikan pijakan yang kuat. Hinduja & Patchin (2015) membuktikan dampak psikologis berkepanjangan dari komunikasi digital agresif pada remaja. Crystal (2006) mengidentifikasi register unik bahasa digital. Ribble (2015) dan Ohler (2012) merumuskan kerangka kewargaan digital yang menempatkan etika komunikasi sebagai elemen wajibnya. Livingstone & Helsper (2010) menekankan pentingnya literasi kritis-reflektif melampaui sekadar akses teknis. Di konteks Indonesia, Nasrullah (2016), Juditha (2020), Winarno (2020), dan Budimansyah (2021) memetakan lanskap digital dan relevansi nilai Pancasila.

Kajian-kajian tersebut meninggalkan sejumlah celah. Pertama, pendekatan yang mengintegrasikan linguistik, kewargaan digital, dan nilai Pancasila secara bersamaan masih sangat langka. Kedua, kajian mengenai emoji sebagai penanda etika kewargaan hampir tidak ada dalam literatur berbahasa Indonesia (Dresner & Herring, 2010). Ketiga, dimensi humanistik dari pilihan bahasa digital belum dieksplorasi secara mendalam dalam konteks Indonesia (Nasrullah, 2016). Keempat, perspektif humaniora kritis sebagai kerangka analisis utama untuk membedah etika bahasa digital dan kewargaan Pancasila belum pernah diajukan secara eksplisit. Kajian ini hadir untuk mengisi celah-celah tersebut sekaligus menawarkan kerangka konseptual orisinal.

Kajian ini bertujuan menganalisis pola diksi, fungsi emoji, dan gaya komunikasi Generasi Z sebagai penanda etika kewargaan digital; mengidentifikasi kesenjangan antara pendidikan nilai dan praktik komunikasi nyata; serta merumuskan kerangka konseptual kewargaan bahasa digital berbasis Pancasila (Jenkins dkk., 2009). Relevansinya terkait langsung dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas ruang publik digital yang dibangun Generasi Z hari ini akan turut menentukan kondisi demokrasi masa mendatang (Floridi, 2014). Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan merosotnya budaya dialog, kajian ini merupakan kajian tentang fondasi etis kehidupan bersama di era digital (Suler, 2004).

THEORETICAL FRAMEWORK

Landasan konseptual utama kajian ini adalah kewargaan digital. Ribble (2015) mendefinisikan kewargaan digital sebagai seperangkat norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, yang mencakup dimensi etika, keamanan, literasi, serta hak dan kewajiban di ranah digital. Ribble (2015) dan Ohler (2012) menempatkan etika komunikasi sebagai elemen wajib kewargaan digital, sementara Livingstone & Helsper (2010) menekankan pentingnya literasi kritis-reflektif yang melampaui sekadar akses teknis. Berdasarkan ketiganya, kajian ini memandang bahasa yang digunakan warga di ruang digital sebagai wujud paling konkret dari etika komunikasi. Namun, kerangka Ribble (2015) dan Ohler (2012) dibangun di atas fondasi liberal-individualistik. Dalam konteks Indonesia, kewargaan digital tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan berbangsa, dan relevansi nilai tersebut bagi lanskap digital telah dipetakan oleh Nasrullah (2016), Juditha (2020), Winarno (2020), dan Budimansyah (2021). Karena itu, kajian ini menjadikan Pancasila, dengan penekanannya pada tanggung jawab kolektif, relasionalitas, dan harmoni sosial, sebagai basis etika komunikasi.

Subjek yang dikaji adalah Generasi Z, yakni individu yang lahir antara 1997 dan 2012 dan tumbuh bersamaan dengan teknologi digital sehingga disebut digital natives (Prensky, 2001). Bagi generasi ini, media sosial berfungsi sebagai arena pembentukan identitas, ruang ekspresi diri, dan panggung partisipasi terhadap isu-isu publik. Ekspresi mereka bersifat multimodal. Crystal (2006) mengidentifikasi register unik bahasa digital, dan fungsi unsur nonverbal dalam komunikasi bermedia komputer telah dikaji oleh Dresner & Herring (2010). Oleh sebab itu, kajian ini tidak hanya memeriksa

kata, tetapi juga tanda dan orientasi komunikasi.

Berdasarkan landasan tersebut, kajian ini mengidentifikasi tiga variabel analisis yang diperlakukan sebagai penanda etika kewargaan digital. Pertama, pilihan diksi, yaitu pilihan kata yang menunjukkan apakah penutur mengakui atau mengikis martabat pihak yang dituju. Kedua, fungsi emoji, yaitu cara emoji beroperasi sebagai sistem tanda nonverbal yang dapat membawa makna berlapis; variabel ini dianalisis melalui semiotika sosial-multimodal Kress (2010) dengan rujukan pada Dresner & Herring (2010). Ketiga, gaya komunikasi daring, yaitu orientasi pragmatik penutur, apakah dialogis dan terbuka terhadap perspektif berbeda atau sekadar strategis dan konsolidatif, yang di antaranya tampak dalam echo chamber, cancel culture, dan performative outrage. Ketiga variabel ini berkaitan dengan sumbu linguistik, semiotik, dan pragmatik pada kerangka konseptual yang diusulkan kajian ini, dan dievaluasi terhadap satu rujukan normatif, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dua variabel kontekstual melengkapinya: struktur insentif platform media sosial dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Hubungan antara bahasa dan konteks digitalnya dijelaskan melalui Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Fairclough (1995), yang memandang wacana pada dimensi teks, praktik diskursif, dan konteks sosial-ideologis. Dengan kerangka ini, pola bahasa yang bermasalah dipahami bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai produk arsitektur diskursif platform yang secara sistematis mengganjar konten kontroversial dengan jangkauan algoritmik lebih luas. Dengan demikian, struktur insentif platform berhubungan positif dengan kemunculan diksi agresif dan gaya komunikasi provokatif: semakin besar ganjaran visibilitas bagi konten emosional dan provokatif, semakin besar pula kecenderungan pola tersebut terbentuk dan menguat. Suler (2004) menambahkan mekanisme psikologisnya melalui efek disinhibisi daring. Minimnya konsekuensi sosial langsung di ruang digital mendorong ekspresi agresif yang lebih berani, sehingga hubungan antara berkurangnya konsekuensi sosial dan agresi verbal juga bersifat positif.

Hubungan antara gaya komunikasi dan etika kewargaan dijelaskan melalui pembedaan Habermas (1984) antara tindakan komunikatif, yang berorientasi pada pemahaman bersama, dan tindakan strategis, yang mengabaikan orientasi tersebut demi kepentingan tertentu seperti konsolidasi identitas kelompok. Ketika orang berbicara bukan untuk mencapai pemahaman, melainkan untuk menang, menonjol, atau mengonsolidasi posisi kelompok, tindakan strategis mengungguli tindakan komunikatif. Orientasi dialogis berhubungan positif dengan semangat musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila, sedangkan orientasi strategis berhubungan negatif dengannya. Dalam penilaian ini, Pancasila berfungsi sebagai sistem referensi normatif. Sila Kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi standar minimum perlakuan terhadap sesama dalam komunikasi, termasuk prinsip proporsionalitas dan hak seseorang untuk didengar. Sila Ketiga menjadi prasyarat agar komunikasi tidak memperkeruh perpecahan. Sila Keempat menuntut komunikasi yang hikmat dan bertanggung jawab, sehingga upaya menyembunyikan intensi di balik lapisan semiotik yang ambigu bertentangan dengan semangat musyawarah dan kejujuran.

Variabel kontekstual terakhir adalah pembelajaran PKn. Winarno (2020) menyatakan bahwa PKn dan Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk warga negara yang beradab, santun, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, penguasaan kognitif atas nilai-nilai Pancasila belum otomatis menghasilkan perilaku komunikasi yang etis di ruang digital (Budimansyah, 2021). Kesenjangan antara pemahaman normatif (knowing) dan tindakan aktual (doing) inilah yang disebut kajian ini sebagai disonansi kewargaan digital. Hubungan antara pengetahuan nilai dan perilaku berbahasa dengan demikian tidak bersifat otomatis, terutama ketika pembelajaran tidak bersinggungan dengan realitas digital yang dihadapi peserta didik setiap hari. Jenkins dkk. (2009) membahas tantangan budaya partisipatif bagi pendidikan media abad ke-21, dan rujukan ini dipakai untuk merumuskan kerangka konseptual serta

memanfaatkan artefak digital sebagai teks analisis dalam pembelajaran. Persoalan ini penting karena kualitas ruang publik digital yang dibangun Generasi Z hari ini turut menentukan kondisi demokrasi masa mendatang (Floridi, 2014).

Secara ringkas, alur hubungan antarvariabel dalam kajian ini adalah sebagai berikut. Struktur insentif platform membentuk pilihan diksi, penggunaan emoji, dan gaya komunikasi Generasi Z, dengan hubungan positif terhadap pola yang agresif dan strategis. Ketiga variabel tersebut kemudian dievaluasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketika pola yang muncul bertentangan dengan nilai tersebut padahal pemahaman normatif sudah dimiliki, terjadi disonansi kewargaan digital. Karena disonansi ini bersumber pada kombinasi struktur platform dan pembelajaran, bukan semata-mata karakter individual, intervensi yang hanya menargetkan individu akan menghasilkan perubahan yang terbatas. Alur inilah yang melandasi Kerangka Triadik Kewargaan Bahasa Digital Berbasis Pancasila (TKLDB-P) yang diuraikan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

METHOD

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan paradigma kualitatif-kritis. Data primer bersumber dari artikel jurnal terindeks Scopus dan Sinta, buku teks akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, We Are Social, dan Kominfo RI. Pengumpulan literatur dilaksanakan melalui Google

Scholar, DOAJ, dan SINTA, mencakup publikasi 2001-2024. Selain itu, observasi non-partisipan terbatas dilakukan terhadap pola komunikasi publik di Instagram, TikTok, dan X yang melibatkan pengguna berusia 15-25 tahun pada konten isu sosial dan pendidikan, tanpa mengakses data privat pengguna. Analisis data menerapkan triangulasi tiga kerangka teoritis. Pertama, Analisis Wacana Kritis (CDA) model tiga dimensi Fairclough (1995): teks, praktik diskursif, dan konteks sosial-ideologis. Kedua, Semiotika Sosial-Multimodal Kress (2010) untuk menganalisis fungsi pragmatik emoji sebagai sistem tanda non-verbal. Ketiga, analisis normatif berbasis nilai Pancasila untuk mengevaluasi keselarasan pola komunikasi yang teridentifikasi dengan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Triangulasi sumber data dan triangulasi teori diterapkan secara simultan untuk menjamin keabsahan dan kedalaman analisis.

RESULT AND DISCUSSION

Ruang digital yang didominasi Generasi Z Indonesia membentuk ekologi bahasa yang unik dan paradoksal. Kreativitas linguistik generasi ini tidak diragukan: hibridisasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah menghasilkan register komunikasi yang kaya, diperkaya lebih jauh oleh ekspresi multimodal berupa teks, emoji, GIF, dan meme. Namun, ekologi bahasa yang sama juga menyuburkan pola komunikasi bermasalah secara etis. Mengacu pada Fairclough (1995), fenomena ini bukan kebetulan, melainkan produk dari arsitektur diskursif platform yang secara sistematis menggenjalar konten kontroversial dengan jangkauan algoritmik lebih luas.

Kondisi inilah yang kajian ini sebut sebagai disonansi kewargaan digital: keadaan di mana seorang warga negara fasih mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila secara normatif, tetapi dalam komunikasi digitalnya justru menampilkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Disonansi ini merupakan sinyal kegagalan pedagogis, bukan semata-mata kegagalan karakter individual. Institusi pendidikan belum berhasil menghadirkan pembelajaran PKn yang relevan dan kontekstual dengan realitas digital yang nyata dihadapi Generasi Z setiap hari.

Analisis leksikal-semantik menghasilkan tiga tipologi diksi yang mencerminkan orientasi kewargaan digital yang berbeda. Diksi inklusif-dialogis ditandai oleh penanda epistemis ("menurut saya", "mungkin"), klausa konsesif ("meski begitu", "di sisi lain"), dan ajakan bertukar pandangan.

Tipologi ini merepresentasikan komunikasi yang paling selaras dengan nilai musyawarah mufakat Pancasila karena secara struktural mengakui legitimasi perspektif yang berbeda. Diksi inklusif-dialogis cenderung muncul pada diskusi pendidikan dan komunitas berbasis minat, di mana norma komunitas lebih menekankan berbagi informasi daripada kompetisi posisi.

Diksi eksklusif-afiliasi beroperasi dengan cara yang lebih halus. Penggunaan istilah satire seperti "boomer", "NPC", atau "cringe" tampak sekadar humor, tetapi menjalankan fungsi eksklusi simbolis dengan memposisikan kelompok tertentu sebagai inferior atau tidak relevan. Dalam kerangka Habermas (1984), diksi jenis ini merepresentasikan tindakan komunikasi strategis yang mengabaikan orientasi pemahaman bersama demi kepentingan konsolidasi identitas kelompok. Diksi agresif-destruktif adalah tipologi yang paling terang-terangan bermasalah. Strategi dehumanisasi, serangan ad hominem, dan pesan diskriminatif yang terbungkus dalam ungkapan ambigu mencerminkan pelanggaran langsung terhadap Sila Kedua Pancasila.

Yang paling signifikan secara analitis, kajian ini menemukan bahwa ketiga tipologi tersebut tidak bersifat mutually exclusive pada diri pengguna yang sama: seseorang bisa tampil inklusif dalam satu konteks dan agresif dalam konteks lain. Hal ini menunjukkan bahwa etika kewargaan digital lebih merupakan fungsi dari norma komunitas digital dan desain platform daripada karakter individual yang tetap dan konsisten. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi desain intervensi pendidikan: strategi yang hanya menargetkan karakter individual tanpa mengubah norma komunitas digital dan struktur insentif platform akan menghasilkan perubahan yang terbatas.

Emoji telah berevolusi melampaui fungsi dekoratif awalnya. Bertolak dari Kress (2010) dan Dresner & Herring (2010), kajian ini mengidentifikasi empat fungsi semiotik emoji yang berbeda secara etis dalam komunikasi Generasi Z: (1) afektif-empatik, yakni menyampaikan dukungan tulus; (2) ironi-sarkastik, yakni menggunakan emoji positif dalam konteks ejekan; (3) dehumanisasi-simbolik, yakni mereduksi seseorang ke representasi non-human; dan (4) ambiguitas defensif, yakni mempertahankan penyangkalan bahwa pesan dimaksudkan sekadar bercanda.

Fungsi ironi-sarkastik dan ambiguitas defensif menciptakan situasi yang dapat disebut sebagai jebakan semiotik: korban mengalami kekerasan verbal tetapi tidak memiliki bukti yang meyakinkan karena pelaku berlindung di balik simbol yang tampak ramah. Mekanisme ini merupakan perluasan dari efek disinhibisi daring yang diidentifikasi Suler (2004): minimnya konsekuensi sosial langsung di ruang digital mendorong ekspresi agresif yang lebih berani. Pada kasus emoji, fenomena ini semakin kompleks karena agresi aktif terbungkus dalam simbol yang secara denotatif bersifat positif, sehingga menyulitkan pelaporan dan respons sosial yang tepat.

Dari perspektif Pancasila, penggunaan emoji untuk menyembunyikan intensi sebenarnya di balik lapisan semiotik yang ambigu bertentangan dengan spirit musyawarah dan kejujuran dalam Sila Keempat. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara memalsukan makna tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi yang hikmat dan bijaksana. Literasi semiotik, yakni kemampuan membaca makna berlapis dari tanda-tanda digital termasuk emoji, karena itu harus diperlakukan sebagai kompetensi kewargaan inti, bukan tambahan opsional dalam kurikulum PKn.

Analisis pragmatik mengidentifikasi tiga gaya komunikasi dominan yang secara struktural merugikan etika kewargaan Pancasila. *Echo chamber* muncul dari desain algoritmik yang memperkuat paparan terhadap pandangan sejenis, sehingga secara progresif mempersempit toleransi epistemis pengguna. Cancel culture, meski digerakkan oleh dorongan keadilan sosial, kerap mengabaikan prinsip proporsionalitas dan hak seseorang untuk didengar, dua nilai yang merupakan inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua Pancasila). Performative outrage merepresentasikan kondisi di mana ekspresi moral tidak lagi digerakkan oleh kepedulian substantif, melainkan oleh insentif visibilitas dalam ekosistem digital yang mengganjar kontroversi.

Ketiga fenomena ini bukanlah perilaku individual yang semata-mata dapat diselesaikan melalui internalisasi nilai. Mereka adalah produk dari struktur insentif platform yang secara sistematis mengganjar konten emosional dan provokatif. Dalam kerangka Habermas (1984), ketiga gaya komunikasi ini merepresentasikan kemenangan tindakan strategis atas tindakan komunikatif: orang berbicara bukan untuk mencapai pemahaman, melainkan untuk menang, menonjol, atau mengonsolidasi posisi kelompok. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan ideal musyawarah mufakat yang menjadi ciri demokrasi Pancasila. Implikasinya, pendidikan karakter digital yang hanya menargetkan individu tanpa mengkritisi struktur platform adalah intervensi yang tidak lengkap.

Bertolak dari keseluruhan analisis, kajian ini memperkenalkan Kerangka Triadik Kewargaan Bahasa Digital Berbasis Pancasila (TKLDB-P) sebagai alternatif terhadap model kewargaan digital yang ada. Berbeda dari kerangka Ribble (2015) dan Ohler (2012) yang dibangun di atas fondasi liberal-individualistik, TKLDB-P berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan tanggung jawab kolektif, relasionalitas, dan harmoni sosial sebagai basis etika komunikasi. TKLDB-P mengevaluasi kualitas kewargaan digital secara simultan pada tiga sumbu yang saling berinteraksi.

Sumbu Linguistik menilai apakah pilihan diksi mengakui atau mengikis martabat pihak yang dituju. Sumbu Semiotik menilai konsistensi antara makna yang dimaksud dan makna yang disampaikan, tanpa manipulasi ambiguitas. Sumbu Pragmatik menilai apakah orientasi komunikasi bersifat dialogis dan terbuka terhadap perspektif berbeda, atau sekadar strategis dan konsolidatif. Kelima sila Pancasila beroperasi sebagai sistem referensi normatif: Sila Kedua sebagai standar minimum perlakuan terhadap sesama dalam komunikasi, Sila Ketiga sebagai prasyarat tidak memperkeruh perpecahan, dan Sila Keempat sebagai tuntutan komunikasi yang hikmat dan bertanggung jawab.

TKLDB-P tidak dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi normatif-punitif, melainkan sebagai kerangka diagnostik yang membantu pendidik mengidentifikasi dimensi kewargaan digital yang perlu diperkuat, merancang kurikulum PKn yang kontekstual-digital, dan mengembangkan indikator kompetensi kewargaan yang terukur (Jenkins dkk., 2009). Kerangka ini menawarkan titik pertemuan yang selama ini absen antara kajian bahasa, kajian humaniora, dan Pendidikan Pancasila dalam menghadapi tantangan ruang publik digital.

Temuan kajian ini bermuara pada satu argumen inti: model pembelajaran PKn berbasis transmisi nilai tidak cukup untuk menghasilkan warga negara digital yang etis. Paradoks knowing-doing yang menjadi benang merah kajian ini adalah indikasi bahwa sistem pendidikan belum berhasil menjembatani ruang kelas dan ruang digital. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai analis aktif terhadap komunikasi digital mereka sendiri, bukan sebagai penerima pasif nilai-nilai normatif.

Secara konkret, kurikulum PKn perlu mengintegrasikan literasi semiotik, literasi wacana kritis, dan pemahaman tentang struktur insentif platform sebagai kompetensi inti. Artefak digital seperti postingan viral, komentar kontroversial, dan meme dapat dimanfaatkan sebagai teks analisis nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan keseharian peserta didik (Jenkins dkk., 2009). Transformasi ini menuntut pergeseran paradigma: dari pendidikan tentang kewargaan menuju pendidikan melalui praktik kewargaan digital yang nyata dan reflektif. Peserta didik yang mampu menganalisis mengapa platform digital secara struktural mendorong mereka berbahasa agresif akan lebih mampu melawan logika tersebut secara kritis dan sadar.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa bahasa sopan di media sosial bukan soal etiket permukaan, melainkan indikator konkret dari tingkat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kewargaan

nyata Generasi Z. Analisis terhadap tiga dimensi komunikasi digital mengungkap kondisi disonansi kewargaan digital yang sistemik: diksi agresif terbentuk dan menguat melalui normalisasi algoritmik; emoji beroperasi sebagai sistem semiotik berlapis yang memungkinkan agresi tersamar; dan gaya komunikasi dominan di media sosial secara struktural bertentangan dengan spirit musyawarah Pancasila. Akar dari kondisi ini bukan sekadar defisit karakter individual, melainkan kegagalan sistem pendidikan menghadirkan pembelajaran kewargaan yang kontekstual dengan realitas digital.

Kontribusi orisinal kajian ini adalah Kerangka TKLDB-P, yang menawarkan basis konseptual Pancasila untuk mengevaluasi dan mengembangkan kewargaan bahasa digital. Kerangka ini perlu diuji secara empiris melalui penelitian lapangan, analisis korpus linguistik digital berskala besar, dan studi efektivitas implementasinya dalam pembelajaran PKn. Kajian ini menegaskan bahwa mempersiapkan Generasi Z sebagai warga negara digital yang berkeadaban adalah tanggung jawab yang sama mendasarnya dengan pendidikan demokratis konvensional. Untuk tugas itu, Indonesia memiliki sumber daya filosofis yang kuat dalam Pancasila yang menunggu untuk dioperasionalisasikan secara nyata, bukan sekadar diajarkan sebagai pengetahuan hafalan.

REFERENSI

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Laporan survei profil internet Indonesia 2023*. APJII. <https://apjii.or.id/survei>
- Budimansyah, D. (2021). Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 1-15.
- Crystal, D. (2006). *Language and the internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Dresner, E., & Herring, S. C. (2010). Functions of the nonverbal in CMC: Emoticons and illocutionary force. *Communication Theory*, 20(3), 249-268. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2010.01362.x>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press. (Karya asli diterbitkan 1981).
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. MIT Press.
- Juditha, C. (2020). Ujaran kebencian di media sosial dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 24(2), 115-126. <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.2366>
- Kemp, S. (2024, 31 Januari). *Digital 2024 global overview report*. We Are Social & Meltwater. <https://wearesocial.com/global-digital-report/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan penanganan konten negatif tahun 2023*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo RI.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers' use of the internet: The role of online skills and internet self-efficacy. *New Media & Society*, 12(2), 309-329. <https://doi.org/10.1177/1461444809342697>
- Nasrullah, R. (2016). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Ed. ke-2). Simbiosis Rekatama Media.
- Ohler, J. B. (2012). *Digital community, digital citizen*. Corwin Press.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.

<https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321-326.
<https://doi.org/10.1089/1094931041291295>
- Winarno. (2020). *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi* (Ed. ke-5). Bumi Aksara.